

RINGKASAN

**FITRI INTAN NATASYA
NIM 210510141**

**Implementasi Kewenangan Kota Lhokseumawe
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan
(Dr. Malahayati, S.H., LL.M dan Dr. Marlia
Sastro, S.H., M.Hum)**

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Lhokseumawe memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya cukup besar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010, telah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, khususnya terkait batas kewenangan pengelolaan wilayah laut dan koordinasi kelembagaan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pembinaan nelayan, sarana produksi, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengimplementasikan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menguraikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden yang terdiri atas pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Lhokseumawe, nelayan, serta tokoh masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui program pengembangan budidaya, pemberdayaan kelompok nelayan, pelatihan pengolahan hasil laut, serta penyediaan sarana penangkapan. Kendala yang dihadapi yaitu masih adanya praktik *illegal fishing*, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia nelayan yang cenderung menggunakan alat tangkap tradisional, serta infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum optimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kelautan dan perikanan meliputi patroli laut terpadu melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pemberdayaan, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas tempat pelelangan ikan guna mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Disarankan agar Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih memperkuat pemberdayaan nelayan, serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah *illegal fishing*, guna mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan, Pemerintah Daerah, Sumber Daya, Perikanan

SUMMARY

**FITRI INTAN NATASYA
NIM 210510141**

Implementation of the Authority of Lhokseumawe City in the Management of Marine and Fisheries Resources
(Dr. Malahayati, S.H., LL.M and Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum)

The management of marine and fisheries resources in Lhokseumawe City has considerable potential in both capture fisheries and aquaculture. Although Law Number 23 of 2014, Law Number 11 of 2006, and Aceh Qanun Number 7 of 2010 regulate the division of authority between the provincial and district/city governments, implementation in the field still faces obstacles, particularly regarding the boundaries of maritime management authority and institutional coordination. This condition affects the optimal development of fishermen, production facilities, and the supervision of fisheries resource utilization.

This study aims to explain how the Lhokseumawe City Government implements its authority in managing marine and fisheries resources, to identify the challenges encountered in its implementation, and to describe the efforts undertaken to overcome these obstacles.

This research uses an empirical juridical method. The data sources were obtained from interviews with informants and respondents from the Food Security, Agriculture, and Fisheries Service of Lhokseumawe City, fishermen, and community leaders. Data were analyzed qualitatively.

The results show that the implementation of the authority of the Lhokseumawe City Government in marine and fisheries resource management is carried out through aquaculture development programs, fishermen group empowerment, fish processing training, and the provision of fishing facilities. The challenges encountered include the persistence of illegal fishing practices, limited human resource capacity among fishermen who mainly use traditional fishing gear, and suboptimal fisheries port infrastructure. The efforts taken by the Lhokseumawe City Government to overcome these constraints include integrated maritime patrols through cross-sector cooperation, capacity-building and empowerment training for fishermen, as well as the development of port infrastructure and fish auction facilities to achieve sustainable and competitive fisheries resource management.

It is recommended that the Lhokseumawe City Government further strengthen fishermen empowerment and enhance monitoring to prevent illegal fishing, in order to support more effective and sustainable marine and fisheries resource management.

Keywords: Implementation, Authority, Local Government, Resources, Fisheries